

LAPORAN AKHIR

KAJIAN PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (PEL) KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA



TIM PENELITI

DR. ADE MUHARAM, S.PI, M.SI
YOWAN TAMU, M.A
RIDWAN IBRAHIM, S.PD, M.SI
HERWIN MOPANGGA, SE, M.SI
RAHMAT J. BUHANG, S.PT

BAPPEDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
JL. TRANS SULAWESI DESA BOROKO KECAMATAN KAUDIPANG 95765
SULAWESI UTARA
INDONESIA

Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Diterbitkan atas Kerjasama Antara
Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNG

Tim Penyusun

Dr. Ade Muharam, S.Pi, M.Si
Yowan Tamu, M.A
Ridwan Ibrahim, S.Pd, M.Si
Herwin Mopangga, SE, M.Si
Rahmat J. Buhang, S.Pt

Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Jl. Trans Sulawesi Desa Boroko Kecamatan Kaidipang 95765
Sulawesi Utara
INDONESIA

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo 96128
Phone: +62-0435-821125
Fax: +62-435-821752
INDONESIA
Laman: <http://www.ung.ac.id>



KATA PENGANTAR

Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmatNya kepada kita, sehingga **Laporan Akhir Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dari seluruh proses **Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara**.

Penyusunan Laporan Akhir Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bolaang Mongodow Utara adalah salah satu dokumen kajian perencanaan pembangunan daerah yang secara khusus ditujukan untuk mempersiapkan langkah-langkah aksi dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam potensial yang ditujukan untuk mendorong perekonomian daerah.

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Pengembangan Ekonomi Lokal ini telah menjadi komitmen bersama masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang secara sadar dan penuh tanggung jawab dituangkan di dalam Misi Pertama Pembangunan Daerah, yaitu *mewujudkan pengembangan investasi swasta dan ekonomi kerakyatan yang handal berbasis potensi lokal (desa); serta kemandirian ekonomi daerah*. Oleh karena itu, kami memandang **Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bolaang Mongodow Utara** ini sebagai salah satu langkah konkret masyarakat dan pemerintah Bolaang Mongondow Utara untuk terus berupaya memperkuat instrumen perencanaan yang mengarah kepada pengelolaan sumberdaya alam yang terpadu dan berkelanjutan.

Pada kesempatan ini, selaku Kepala Bappeda yang salah satu tupoksinya adalah bertanggung jawab terhadap penyusunan, implementasi dan monitoring program serta kegiatan pembangunan di daerah, menyampaikan terima kasih kepada teman-teman Kepala Dinas, SKPD, Para Kepala Bidang di lingkungan Bappeda serta para stakeholder yang telah turut membantu memberikan kontribusi aktif dalam proses persiapan, Presentasi Pendahuluan dan FGD, dan Presentasi Akhir maupun proses Penyusunan Laporan ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Rektor dan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan mandat penugasan kepada Tim Peneliti yang telah bekerja dengan cukup baik membantu kami dalam merealisasikan niat tulus kami untuk memiliki **Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bolaang Mongodow Utara** yang Insya Allah akan kami implementasikan pada tahun 2017 dan 2018.

Akhirnya besar harapan kami, semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan salah satu bahan rujukan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, Nopember 2016
Kepala Bappeda
Kabupaten Bolaang Mongodow Utara

Drs. LEKSI TALIBO



KATA PENGANTAR
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M)
Universitas Negeri Gorontalo

Pertama-tama, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahNya, kita semua dapat menyelesaikan **Laporan Akhir Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bolaang Mongodow Utara** yang merupakan salah satu bagian dari serangkaian tahapan yang dilaksanakan dalam rangka **Penyusunan Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bolaang Mongodow Utara**.

Laporan Akhir ini berisikan kompilasi data primer dan sekunder serta informasi yang diperoleh melalui FGD dari tahap awal hingga akhir kajian yang telah disusun oleh Tim Peneliti sejak bulan Agustus 2016. Terdapat dua bagian utama dalam laporan ini, yaitu (1) Bagian Pertama berisikan dan menguraikan Gambaran Umum Profil Wilayah Kajian; dan (2) Bagian Kedua berisikan hasil diskusi dan persepsi para stakeholder yang hadir menjadi peserta, baik dalam Presentasi Pendahuluan, FGD, maupun dalam Presentasi Akhir.

Urgensi hasil **Laporan Akhir Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Bolaang Mongodow Utara** ini menjadi sangat nyata sebagai bagian dari proses pembangunan dan pengembangan ekonomi daerah Bolaang Mongondow Utara.

Akhirnya, kembali dengan mengharap taufik dan hidayah dari Maha Pencipta dan Pengatur Seluruh Mahluk-Nya, kami menitipkan laporan ini agar kiranya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat Bolaang Mongondow Utara.

Gorontalo, Nopember 2016

Ketua LP2M-UNG

Prof. Dr. FENTY. U. PULUHULAWA, SH., M.Hum

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
Identitas Laporan	ii
Kata Pengantar Kepala Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	iii
Kata Pengantar Ketua LP2M-UNG	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vi
Daftar Singkatan	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Output dan Ruang Lingkup Kajian	3
1.4 Kerangka Pikir	4
BAB II. KAJIAN TEORITIS	5
2.1 Konsep PEL	5
2.2 PEL Dalam Pembangunan Pertanian	6
2.3 Peranan Perkebunan Dalam PEL	7
2.4 Konsep Multiplier Effect	8
2.5 Kemitraan Dalam PEL	9
BAB III. METODOLOGI	12
3.1 Cakupan Wilayah Administrasi dan Letak Geografis	12
3.2 Tahapan Penyusunan	12
3.3 Metode Kajian PEL	14
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	16
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	16
4.2 Tinjauan Kinerja Ekonomi	17
4.3 Analisis Sektor Basis	23
4.4 Hasil Survey dan FGD	25
BAB V. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	36
5.1 Kesimpulan	36
5.2 Rencana Tindak Lanjut	36
DAFTAR PUSTAKA	37

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1	Tahapan Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	13
2	Karakteristik Pengungkit dan Penghambat Dalam Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	15
3	Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	17
4	Kontribusi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014	22
5.	Hasil perhitungan LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Bolmut (Data Hasil Olahan BPS, 2013; Sambuari dkk, 2015)	24
6.	Hasil Analisis LQ Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013.(Sumber data : BPS diolah 2015)	35

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
1	Kerangka Pikir Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongodow Utara	4
2	Cakupan Wilayah Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongodow Utara	12
3	Skema Tahapan Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	12
4	Penentuan Nilai Skor Karakteristik Komoditas Dalam Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	15
5	Peta Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	16
6	PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah)	19
7	Struktur Perekonomian Bolaang Mongondow Utara Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2010 – 2014	20
8.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2014	21
9.	Trend kinerja Sektor Basis (Analisis Regresi Linear Data BPS, 2014)	25
10.	Penentuan Klaster Komoditas/Usaha PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	27
11.	Grafik Produksi Perikanan Tangkap Bolaang Mongondow Utara Periode 2010 - 2015	31
12.	Grafik Jenis Ikan Produksi Perikanan Tangkap Bolaang Mongondow Utara	32

DAFTAR SINGKATAN

AHP	:	Analytical Hierarchy Process
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Bappeda	:	Badan perencanaan Pembangunan Daerah
BKPMD	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Bappenas	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BOT	:	Built, Operate, and Transfer
BPR	:	Bank Perkreditan Rakyat
BPS	:	Badan Pusat Statistik
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
IDT	:	Inpres Desa Tertinggal
ILGR	:	Innitiative for Local Government Reform
KPEL	:	Kemitraan untuk Pengembangan Ekonomi Lokal
KSP	:	Kelompok Simpan Pinjam
KUBE	:	Kelompok Usaha Bersama
K/L	:	Kementerian/Lembaga
Kepres	:	Keputusan Presiden
LAKIP	:	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
LKM	:	Lembaga Keuangan Mikro
MBO	:	Management By Objective
MBR	:	Management By Result
MDS	:	Multi Dimensional Scaling
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto
PEL	:	Pengembangan Ekonomi Lokal
PEMP	:	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Perda	:	Peraturan Daerah
Perkada	:	Peraturan Kepala Daerah
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Perpu	:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
RALED	:	Rapid Assessment for Local Economic Development
Renja	:	Rencana Kerja
RKPD	:	Rencana Kerja Pembangunan Daerah
SKPD	:	Satuan Kerja Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia diperkirakan akan mengalami banyak kerugian karena belum siap melakukan era perdagangan bebas (ekonomi global). Untuk dapat mengambil peluang, manfaat, dan keterlibatan dalam ekonomi global tersebut, maka bangsa Indonesia membutuhkan strategi pembangunan wilayah yang diarahkan pada terjadinya pemerataan (*equity*), mendukung pertumbuhan (*efficiency*) dan keberlanjutan (*sustainability*). Prinsip yang dapat dijadikan indikator dalam pengembangan wilayah tersebut adalah daya saing, produktivitas, dan efisiensi. Sehingga paradigma pembangunan yang dilakukan harus lebih diorientasikan pada pembangunan spasial pada tingkat wilayah dan lokal dengan lebih mengutamakan kapasitas ekonomi lokal (*local economic development*).

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah membuka peluang pemerintah daerah untuk mengatur dan melakukan intervensi langsung dalam pengembangan ekonomi daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai kompetitif dan berorientasi global di masing-masing wilayahnya. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya polarisasi yang mencolok antara wilayah maju dan wilayah yang kurang berkembang.

Konsep pengembangan wilayah yang berbasis ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kapasitas lokal yang semakin berkembang (*endogeneous development*). Prinsip utama dalam implementasi pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah kemitraan. Adanya kerjasama pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program PEL dalam suatu wilayah. Pembangunan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses pembangunan ekonomi dimana *stakeholders endogeneous* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) yang berperan aktif dalam mengelola sumber daya lokal untuk menciptakan lapangan kerja dan memberikan stimulus pada pertumbuhan ekonomi di wilayahnya. Prinsip penerapannya adalah kerjasama *stakeholders* yang akan sangat menentukan keberlanjutan pengembangan ekonomi lokal (Blakely, 1984 dalam Supriyadi, 2007). Berdasarkan fokus penerapannya, tujuan PEL meliputi:

1. Membentuk jaringan kerja *kemitraan* antara pelaku ekonomi untuk pemanfaatan potensi lokal dengan meningkatkan *kapasitas pasar* pada tingkat lokal, regional dan global.
2. Meningkatkan *kapasitas lembaga lokal* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam pengelolaan PEL.
3. Terjadinya *kolaborasi antar aktor* baik publik, bisnis dan masyarakat
4. Secara kolektif akan mendorong kondisi yang nyaman dalam *pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan*

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat dan meningkatnya pendapatan masyarakat sehingga berkurangnya kesenjangan antara masyarakat pedesaan dan perkotaan serta mendukung kebijakan pengentasan kemiskinan. Dalam proses implementasi perencanaan dan penerapan PEL ini menggunakan prinsip pendekatan ekonomi, kemitraan, dan kelembagaan.

1. Prinsip ekonomi

- Mulai dengan kebutuhan pasar
- Menfokuskan pada kluster dari kegiatan ekonomi yang ada, yang produksinya dijual ke daerah luar (*economic base*) dan *multiplier effect* di daerahnya kuat
- Menhubungkan produsen skala kecil dengan *supplier* kepada perusahaan ekspor.

2. Prinsip Kemitraan

- Adanya tanggung jawab dari masing-masing *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) sebagai aktor pengembang dan pengelola ekonomi lokal.
- Masing-masing *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) berperan aktif dalam bekerjasama
- Kemitraan mengandalkan sumber daya lokal, bukan bantuan dari luar atau asing
- Inisiatif digerakkan oleh pembeli, pasar, dan permintaan bukan produksi atau *supply*

3. Prinsip Kelembagaan

- Fasilitas dialog diantara *stakeholders* (pemerintah, swasta, dan masyarakat) untuk menghasilkan ide dan inisiatif
- Mobilisasi sumber daya lokal untuk menunjang inisiatif yang diusulkan
- Pengembangan kelembagaan didasarkan atas kebutuhan dari kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung

Ketiga prinsip tersebut dapat dijadikan sebagai strategi pendekatan dan proses perencanaan mengembangkan ekonomi lokal yang dilakukan atas dasar partisipasi dan kemitraan dalam kerangka pengembangan kelembagaan. Partisipasi dalam konteks pemerintah diartikan sebagai forum yang terorganisasikan guna memfasilitasi komunikasi antar pemerintah, masyarakat dan *stakeholders* dan berbagi kelompok yang berkepentingan terhadap penanganan masalah atau pengambilan keputusan. Partisipasi dan kemitraan antar pelaku dalam PEL berkaitan erat dengan prinsip keterbukaan, pemberdayaan, efisiensi, dan *good governance*. Dengan demikian, dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

1. Perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha
2. Perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan
3. Keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran
4. Keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal (Supriyadi, 2007)

Dalam konteks pembangunan wilayah, keberhasilan PEL akan mendorong percepatan pertumbuhan wilayah yang berkembang dan tertinggal. Sehingga akan berkurangnya anggapan eksploitasi pembangunan wilayah maju terhadap wilayah miskin (kesenjangan wilayah). Pada akhirnya, konsep PEL menjadi alternatif bagi pengembangan wilayah yang didasarkan atas pembangunan kapasitas lokal (sumberdaya alam, manusia, kelembagaan) semakin berkembang.

1.2 Tujuan

Tujuan umum kajian ini adalah menghasilkan desain atau model Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai bahan koordinasi dalam kebijakan pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sedangkan secara khusus, kajian ini bertujuan untuk:

- Menganalisis potensi lokal yang dapat dijadikan *branding* dalam meningkatkan daya saing dan keunggulan daerah sebagai basis pembentukan kluster industri.
- Mengkaji penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai pendekatan pembangunan yang meliputi aspek aspek optimalisasi sumberdaya lokal, pola kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- Mengkaji pola partisipasi masyarakat yang berbasis pada kekuatan sosial budaya lokal dalam mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal
- Menyusun rekomendasi kebijakan dan strategi pengelolaan dan pengembangan ekonomi lokal.

1.3 Output dan Ruang Lingkup Kajian

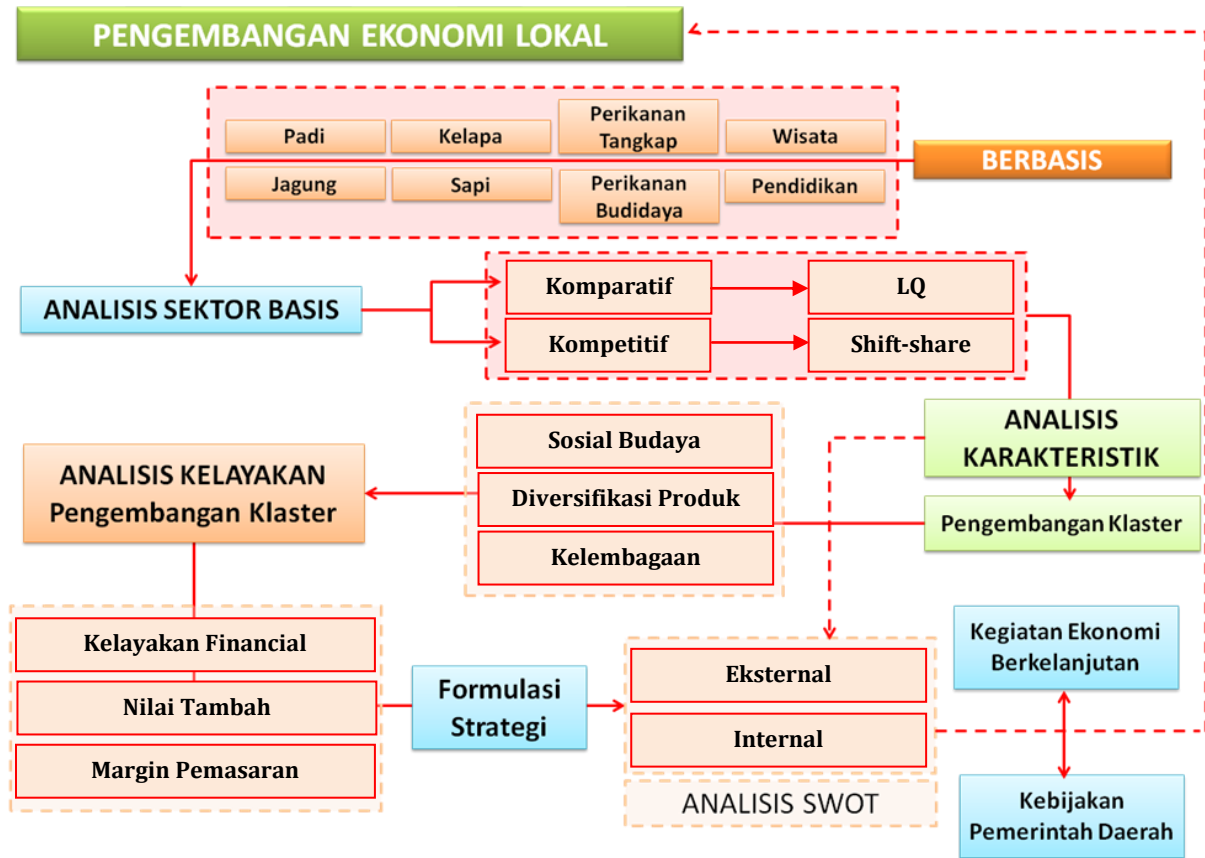
Output dari kajian ini adalah:

- Terdapatnya disain Pengembangan Ekonomi Lokal pada komoditas dan usaha yang mempunyai kekuatan dalam mendorong perekonomian daerah;
- Terdapatnya arahan kebijakan pemerintah daerah untuk mendukung dan mendorong Pengembangan Ekonomi Daerah;
- Terdapatnya kelembagaan yang secara efektif menggalang kemitraan dalam mendorong Pengembangan Ekonomi Lokal;

Sedangkan ruang lingkup kajian meliputi:

- Pengembangan Sumber Daya Lokal
- Pengembangan Pola Kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha, Masyarakat Lokal dan Organisasi Masyarakat untuk pengembangan usaha ekonomi.
- Pengembangan pola partisipatif masyarakat lokal yang berbasis sosial budaya masyarakat.

1.4 Kerangka Pikir Kajian



Gambar 1. Kerangka Pikir Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

II. KAJIAN TEORITIS

2.1 Konsep PEL

Pengembangan ekonomi lokal menurut Blakely dan Bradshaw adalah proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Pengembangan ekonomi lokal adalah suatu proses yang melibatkan pembentukan kelembagaan baru, perkembangan industri baru, pengembangan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih bermutu, identifikasi pasar baru serta pendirian usaha-usaha baru.

Sedangkan menurut World Bank (2001) adalah proses dimana para pelaku pembangunan, bekerja kolektif dengan mitra dari sektor publik, swasta dan non pemerintah, untuk menciptakan kondisi lebih baik bagi pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja (dalam Nurzaman, 2002). Peranan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi lokal sangat penting, dalam hal ini pemerintah daerah berperan menjalankan fungsinya sebagai pelopor pengembangan, koordinator, fasilitator, dan stimulator. Peranan pemerintah daerah juga sangat diperlukan dalam hal memperhatikan infrastruktur yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan industri, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Selain pemerintah daerah, peranan swasta dan kelompok masyarakat juga diperlukan dalam kegiatan manajemen wilayah dan pencarian solusi atas permasalahan tertentu. Sementara itu, salah satu kebijaksanaan pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada prinsip keuntungan kompetitif, salah satunya melalui pengembangan potensi ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008).

Potensi ekonomi daerah didefinisikan oleh Suparmoko (2002) sebagai “kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang mungkin dan layak dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan rakyat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan.” Sumihardjo (2008) menjelaskan bahwa pengembangan sektor unggulan yang dimiliki daerah tercermin pada visi dan misi daerah yang tertuang di dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana jangka menengah daerah (RPJMD). Hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan potensi daerah yang tertuang dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan pada dasarnya adalah kunci keberhasilan pengembangan potensi ekonomi lokal untuk menguatkan daya saing daerah. Muktianto (2005) menjelaskan bahwa pendekatan yang umum dalam pengembangan potensi daerah dengan cara menelaah komponen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), komponen sumber daya manusia, teknologi dan sistem kelembagaan. (dikutip dari Sumiharjo, 2008, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 1, No.1 | 191 h.12). Dalam menelaah PDRB dilakukan untuk mengetahui potensi basis dan non

basis. Suatu daerah yang memiliki keunggulan memberikan kekhasan tersendiri yang tidak ada pada daerah lain, sehingga sektor unggulan tadi dapat dikatakan sebagai kegiatan basis (Triyuwono & Yustika, 2003).

Tarigan (2002) menjelaskan bahwa teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Perekonomian regional dapat dibagi menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan bukan basis. Kegiatan basis adalah mengekspor barang dan jasa ke tempat-tempat di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan bukan basis adalah kegiatan yang tidak mengekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri. Bertambah banyaknya kegiatan basis di dalam suatu daerah akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah yang bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (*primer mover rule*), sedangkan setiap perubahan mempunyai “efek multiplier” terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengetahui sektor basis dan bukan basis antara lain menggunakan metode analisis “*location quotient*” (LQ) (Triyuwono & Yustika, 2003).

Dengan mengetahui kegiatan basis disuatu daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya, maka dapat menguatkan daya saing daerah tersebut. Menurut Abdullah (2002) “daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.” Indikator utama dan prinsip-prinsip penentu daya saing daerah salah satunya adalah perekonomian daerah. Prinsip-prinsip kinerja perekonomian daerah yang mempengaruhi daya saing daerah yakni :

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya jangka pendek.
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang.
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi dimasa lalu.
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah.

Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik (dalam Hermayanti (2013).

2.2 PEL Dalam Pembangunan Pertanian

Peran pertanian dalam pembangunan ekonomi hanya sebagai sumber tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah untuk mengembangkan sektor industri yang berfungsi sebagai unggulan dinamis dalam strategi pembangunan secara keseluruhan (Todaro, 2000). Perkembangan

pembangunan pertanian tidak dapat terlaksana sendiri tanpa adanya dukungan dari semua bidang-bidang kehidupan nasional dimana kegiatan pertanian itu dilaksanakan. Ada tiga tahapan dalam perkembangan pembangunan pertanian, yaitu tahap pertama adalah pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah. Tahap kedua adalah penganekaragaman produk pertanian sudah ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. Tahap yang ketiga adalah tahap yang menggambarkan pertanian modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi (Arsyad, 1992).

Untuk memanfaatkan dan meningkatkan keunggulan sumber daya wilayah secara berkelanjutan dalam pembangunan pertanian, kebijaksanaan pembangunan pertanian harus dirancang dalam perspektif ekonomi wilayah. Saat ini rencana dan implementasi program-program yang disusun oleh daerah sudah menunjukkan perspektif ekonomi wilayah dalam kebijaksanaan pembangunan pertanian yang dirancangnya. Dalam perspektif ini Pemerintah Pusat hanya merancang pelaksanaan yang bersifat makro, sedangkan Pemerintah Daerah merancang pelaksanaan pencapaian target sesuai dengan kondisi wilayah. Sehingga Pemerintah Daerah harus mampu melaksanakan kebijakan tersebut secara maksimal dalam mengelola sumber daya spesifik lokal. Sebagai bahan perencanaan diperlukan analisis potensi wilayah baik dalam aspek biofisik maupun sosial ekonomi. Dalam pemanfaatan potensi tersebut peran serta masyarakat secara partisipatif perlu didorong dan dikembangkan (Sudaryanto, 2002).

2.3 Peranan Perkebunan dalam PEL

Sektor perkebunan memiliki peranan yang sangat potensial di dalam dan di luar negeri. Di dalam negeri produk sektor perkebunan dapat dikonsumsi langsung oleh masyarakat dan sebagai bahan baku industri. Dan bila diusahakan secara sungguh-sungguh atau profesional bisa menjadi suatu bisnis yang menjadikan keuntungan besar (Rahardi, 1993). Pembangunan sub sektor perkebunan terus digalakkan oleh pemerintah secara berangsur melalui program Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup para petani atau pengebum dengan jalan pembukaan areal-areal baru yang kurang produktif di atas lahan kritis, serta menghentikan perladangan yang berpindah-pindah. Dengan proyek Perkebunan Inti Rakyat maka petani dapat menjual komoditas hasil kebunnya kepada pemerintah dengan harga pasaran ekspor serta kualitas komoditas yang terjamin standarnya (Departemen Penerangan, 1998). Potensi ekspor untuk sub sektor perkebunan juga sangat besar. Tetapi diperlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan iklim usaha dan struktur pasar komoditas perkebunan dari sektor hulu sampai ke hilir. Karena kinerja ekspor tidak akan menjadi lebih baik jika masih banyak hambatan yang dihadapi kegiatan pada sektor hulu, pola perdagangan dan distribusi komoditas perkebunan domestik (Arifin, 2001).

2.4 Konsep Multiplier Effect Dari PEL

Multiplier effect adalah suatu konsep yang menjelaskan tentang suatu dampak dari suatu kegiatan yang menyebabkan munculnya kegiatan lain. Ada beberapa pandangan yang berbeda-beda mengenai konsep *multiplier effect* kajian dampak-dampak dalam pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Menurut Tarigan *multiplier effect* dapat terjadi apabila ada satu sektor yang diakibatkan oleh permintaan dari luar wilayah produksinya meningkat, karena ada keterkaitan tertentu membuat banyak sektor lain juga akan meningkat produksinya dan akan terjadi beberapa kali putaran pertambahan sehingga total kenaikan produksi bisa beberapa kali lipat dibanding dengan kenaikan permintaan dari luar untuk sektor tersebut.

Tetapi tidak semua pertumbuhan usaha dapat memberikan dampak yang positif tetapi akan ada juga dampak negatif yang ditimbulkan. Jumlah lapangan kerja, tingkat pendapatan yang diperoleh dan PDRB merupakan dua basis yang digunakan dalam mengukur adanya *multiplier effect*. Selain bidang ekonomi, pengukuran *multiplier effect* juga memasukkan bidang lain diluar ekonomi, seperti bidang sosial, karena dampak di bidang ekonomi akan berakibat pada bidang lain jika terjadi peningkatan dan penurunan dalam kegiatan ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan ekonomi lokal *multiplier effect* adalah suatu keterkaitan langsung dan tidak langsung yang kemudian mendorong adanya kegiatan pembangunan yang diakibatkan oleh kegiatan pada bidang tertentu baik itu positif maupun negatif yang menggerakkan kegiatan di bidang-bidang lain. Bidang-bidang tersebut disederhanakan menjadi dua yaitu bidang ekonomi dan sosial.

a. Bidang Ekonomi

Dalam bidang ekonomi *multiplier effect* dapat dilihat dari PDRB, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kemampuan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, adanya keterkaitan antar sektor yang diakibatkan karena pertambahan permintaan terhadap produksi pada sektor tertentu (Tarigan, 2002). Tetapi ada efek negatif yang bisa ditimbulkan dari perkembangan industri tersebut yaitu *spread effect* dimana perpindahan pekerja yang dibeli industri tersebut yang akan mempengaruhi pendapatan personal dari masyarakat, sehingga memberikan dampak negatif bagi daerah yang mereka tinggalkan.

b. Bidang Sosial

Secara langsung atau tidak langsung dampak sosial yang akan ditimbulkan dari *multiplier effect* adalah pengaruh pada tingkat kesejahteraan atau taraf hidup masyarakat, pelayanan terhadap masyarakat seperti kemudahan akses layanan pendidikan dan kesehatan dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Tetapi, di sisi lain Marshall (1920) menyatakan ada dampak negatif di bidang sosial adanya perkembangan industri di suatu daerah yaitu menjadikan penduduk lebih konsumtif serta kualitas lingkungan hidup yang terancam karena eksploitasi bahan baku secara besar-

besaran. Charles M. Tiebout dalam makalahnya berjudul *The Community Economic Base Study* (1962) menggunakan perbandingan dalam bentuk pendapatan (*income*) dan membuat rincian yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang terkait dengan pengganda basis. Menurut Tarigan (2005), pengganda basis merupakan suatu metode untuk melihat besarnya pengaruh kegiatan ekonomi basis terhadap peningkatan total pendapatan di suatu wilayah. Dalam menggunakan ukuran pendapatan, nilai pengganda basis adalah besarnya kenaikan pendapatan seluruh masyarakat untuk setiap satu unit kenaikan pendapatan di sektor basis.

2.5 Kemitraan (*Partnership*) Dalam PEL

Kemitraan pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dengan kemitraan diharapkan dapat menumbuhkan dan menjamin keberlanjutan jaringan kelembagaan untuk mendukung inisiatif lokal dalam pengembangan ekonomi lokal (Haeruman, 2001).

Sejalan dengan itu, Edward J. Blakely (1994) menguraikan *Public-Private-Partnerships* : “*No matter what organizational structure is selected, public agencies and private firms have to enter into new relationships to make the development process work. This approach is much more than the public sector merely offering cooperation to the private sector to facilitate economic activities for private gain; it is far more than occasional meetings between the municipal council and local business organizations, such as the chamber of commerce. Although these activities are important, and perhaps integral to good business/government relations, they do not constitute true partnerships among the sectors. Partnerships are shared commitments to pursue common economic objectives jointly determined by public, private, and community sectors and instituted as joint actions.*”

Pola kemitraan adalah salah satu konsep yang sudah banyak dikenal. Dalam pola ini diharapkan suatu lembaga mampu berfungsi sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Perlu diingat bahwa salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah arus mampu mencerminkan keikutsertaan para anggotanya (*participatory approach*) dan mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Dari pengalaman yang lalu, keikutsertaan sektor swasta dan wakil dari masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dinamika suatu kemitraan. Bahkan kalau perlu lembaga kemitraan tersebut dipimpin oleh wakil dari swasta atau wakil dari masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi keinerja dari kemitraan itu sendiri. Dengan prinsip “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”, para anggota akan lebih untuk mengutarakan berbagai masalah atau tantangan yang dianggap menjadi ganjalan dalam membangun daerahnya. Banyak pengamat menunjukkan bahwa

kecenderungan didunia usaha sekarang bukan kepada membangun usaha yang semakin besar, tapi kepada unit usaha kecil atau menengah dan independen sehingga menjadi lincah dan cepat tanggap dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Peluang pasar akan terdiri bukan atas peningkatan permintaan yang besar, melainkan atas peluang-peluang kecil.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasat-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Komposisi kemitraan itu sangat bervariasi, tetapi merupakan representasi pelaku ekonomi seperti produsen, pedagang, eksportir, pengolah, pemerintah daerah/pusat, perguruan tinggi, lembaga riset lain, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Lebih lanjut, Herman Haeruman (2001) mengelaborasi kemitraan sebagai suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus-menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non-material, nilai tambah ini akan berkembang terus sesuai dengan meningkatnya tuntutan untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Singkatnya, nilai tambah yang didapat merupakan fungsi dari kebutuhan yang ingin dicapai.

Dalam mengembangkan kemitraan, masing-masing *partner* harus sensitif dan menunjukkan komitmen dan empatinya tidak saja terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan bersangkutan tetapi terutama terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap anggota harus sensitif terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan, tujuannya sendiri, serta tujuan individual identik dengan mencabut akar kemitraan itu sendiri (The Peter F. Drucker Foundation, 1996; Austin, 2000; The Jean Monnet Program, 2001).

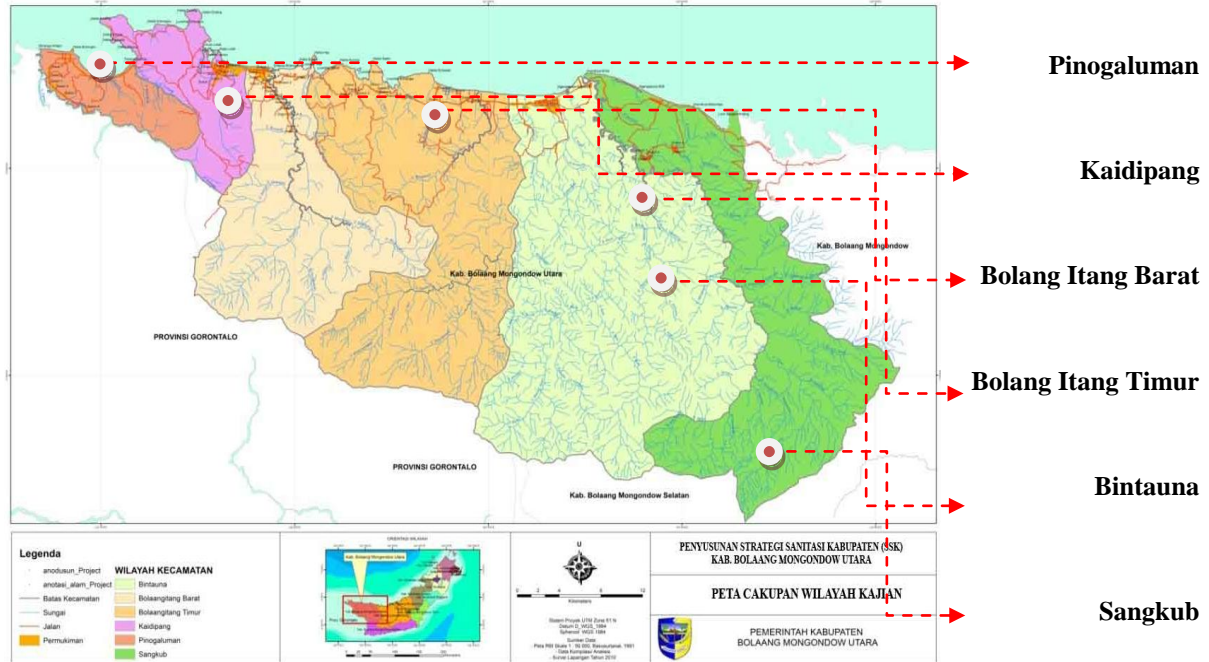
Secara sederhana, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal atau disingkat dengan akronim “KPEL” adalah suatu pendekatan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan kemitraan masyarakat-swasta-pemerintah dan memfokuskan pada pembangunan aktivitas kluster ekonomi, sehingga terbangun keterkaitan (*linkage*) antara pelaku-pelaku ekonomi dalam satu wilayah atau region (perdesaan/kota/kecamatan/kabupaten/propinsi) dengan *market* (pasar lokal, nasional dan pasar internasional) (UNDP, UN-HABITAT & BAPPENAS, 2002). KPEL juga merupakan instrumen

untuk mendukung terciptanya : 1). pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya lokal; 2) peningkatan pendapatan dan penciptaan peluang lapangan kerja; 3). perencanaan yang terintergrasi - baik vertikal dengan horizontal maupun sektoral dan regional (daerah); pemerintahan yang baik (*good governance*).

III. METODOLOGI

3.1 Cakupan Wilayah Administrasi dan Letak Geografis

Kajian ini dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, yaitu dari bulan September hingga Nopember 2016 di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang meliputi 6 (enam) kecamatan, yaitu Kecamatan Pinogaluman, Kaidipang, Bolang Itang Barat, Bolang Itang Timur, Bintauna. Dan Kecamatan Sangkub (Gambar 2).



Gambar 2. Cakupan Wilayah Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

3.2 Tahapan Kajian



Gambar 3. Skema Tahapan Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini dilaksanakan secara bertahap yang masing-masing tahapan akan menghasilkan output yang merupakan input tahapan selanjutnya.

Tabel 1. Tahapan Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Tahapan	Periode			Aktivitas	Output
	Sep	Okt	Nop		
Persiapan	☐			Koordinasi internal tim dan dengan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Dokumen Kesepakatan dan Kerjasama
Pra-Survey	☐			Pengumpulan data-data sekunder yang bersumber dari data pada instansi dan SKPD serta media online	Data Awal Untuk Proses Penyusunan
Presentasi Pendahuluan		☐		<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian materi mengenai Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Penyamaan persepsi mengenai fokus yang akan menjadi substansi PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terdapatnya usulan, tanggapan dan tambahan informasi dari Pimpinan dan staf SKPD yang hadir pada Presentasi Pendahuluan 	Terdapatnya kesamaan persepsi mengenai proses penyusunan PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Survey dan FGD		☐		<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data-data primer yang bersumber dari wawancara dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pengumpulan data kuantitatif melalui Diskusi fokus dengan masyarakat secara langsung 	<ul style="list-style-type: none"> Terdapatnya data dan informasi hasil wawancara secara langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha Terdapatnya data-data kuantitatif pembobotan mengenai karakteristik untuk menentukan klaster komoditas/usaha yang berpotensi sebagai PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Presentasi Akhir			☐	<ul style="list-style-type: none"> Penyampaian materi hasil survey dan FGD. Penyamaan persepsi dan usulan, serta informasi mengenai Rancangan Kebijakan PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. 	Terdapatnya kesamaan persepsi mengenai Rancangan Kebijakan PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

<p>Penyusunan Laporan Akhir</p>	<p>Tim Penyusun melakukan aktifitas Penyusunan Laporan Akhir melalui proses input dan analisis data dan berbagai informasi dari hasil FGD pada Presentasi Akhir.</p>	<p>Laporan Akhir PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara</p>
--	--	--

3.3 Metode Kajian PEL

Berdasarkan tujuannya, metode penelitian yang akan dilakukan ini adalah **metode deskriptif eksploratif**, yang dirancang untuk dapat menguraikan dan menjabarkan kondisi pada aspek kajian. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai data dan informasi serta isu dan permasalahan pada aspek kajian. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai data dan informasi serta isu dan permasalahan pada aspek kajian. Secara umum, kajian ini akan menggunakan metode survey dan observasi lapangan secara langsung dengan pendekatan wawancara dan diskusi dengan masyarakat dan stakeholder lainnya. Pada beberapa aspek kajian, dilakukan metodologi tersendiri agar memperoleh hasil kajian yang lebih optimal.

3.3.1 Metode Analisis Location Quotient (LQ).

Menurut Arsyad (2009), analisis sektor pertanian dan sektor perekonomian lainnya serta subsektor pertanian didekati dengan menggunakan metode Location Quotient (LQ). Dimana Rumus LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{vi / vt}{Vi / Vt}$$

Keterangan:

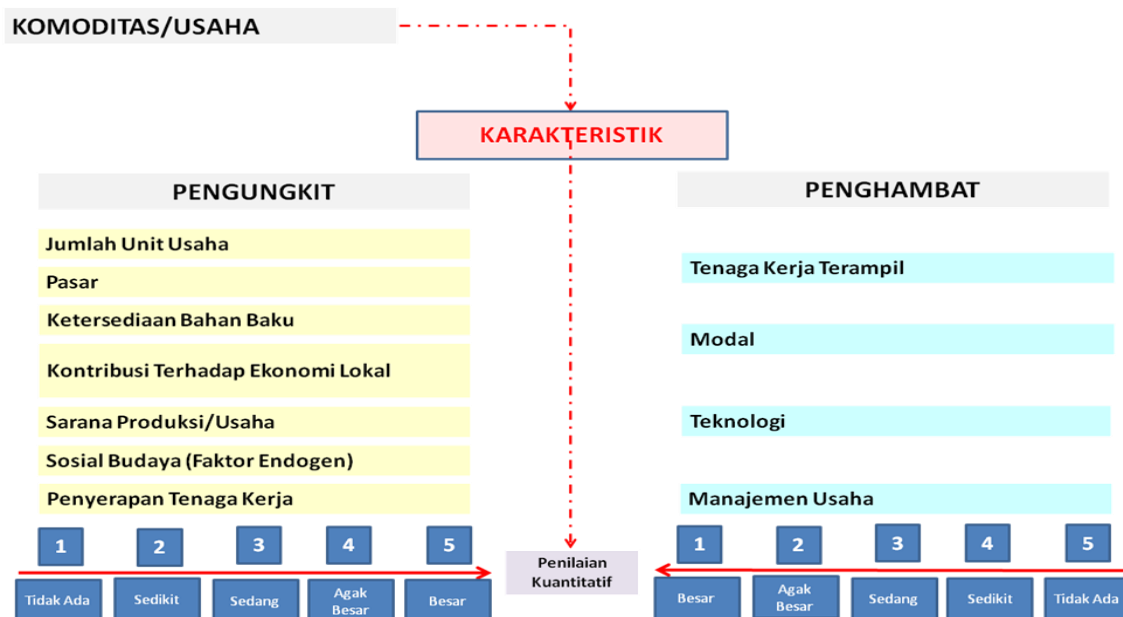
- LQ = Location Quotient
- vi = PDRB subsektor Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun x
- vt = PDRB total sektor Peternakan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun x
- Vi = PDRB subsektor Peternakan tahun x Provinsi Sulawesi Utara
- Vt = PDRB total sektor Peternakan tahun x Provinsi Sulawesi Utara

3.3.2 Metode Analisis Klaster Komoditas/Usaha

Metode ini untuk mngkaji komoditas/usaha yang potensial dikembangkan sebagai PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Penghitingan kuantitatif dilakukan dengan mengitung nilai skor pada setiap aspek yang termasuk faktor pengungkit atau pendukung dan faktor penghambat pertumbuhan komoditas tersebut. Perhitungan skor ini dilakukan dengan pendekatan **Diskusi terfokus (FGD)** agar terjadi interaksi yang dinamis antara peserta diskusi, sehingga penentuan komoditas PEL merupakan salah satu bentuk kesamaan persepsi masyarakat.

Tabel 2. Karakteristik Pengungkit dan Penghambat Dalam Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Karakteristik	Kriteria	Variabel
Pengungkit	Jumlah unit/usaha	Keberadaan usaha di lokasi
	Ketersediaan Pasar	Jangkauan/Wilayah Pemasaran, Kemudahan Mendistribusikan
	Ketersediaan Bahan Baku	Ketersediaan/Kemudahan Bahan Baku, Harga Perolehan Bahan Baku, Parishability Bahan Baku (Mudah atau Tidaknya Rusak), Kesenambungan dan Mutu Bahan Baku
	Sumbangan Terhadap Perkonomian	Jaringan pertumbuhan ekonomi yang dapat terjadi sebagai akibat dari berkembangnya usaha komoditi ini.
	Sarana Produksi/Usaha	Ketersediaan/kemudahan Memperoleh dan Harga
	Sosial Budaya (Faktor Endogen)	Ciri Khas Lokal, Penerimaan Masyarakat, Turun Tenurun
	Penyerapan Tenaga Kerja	Kemampuan Menyerap Tenaga Kerja
Penghambat	Tenaga Kerja Terampil (Skilled)	Tingkat Pendidikan, Pelatihan, Pengalaman Kerja, Jumlah Lembaga/Sekolah Keterampilan/Pelatihan
	Modal	Kebutuhan Investasi Awal, Kebutuhan Modal Kerja, Aksesibilitas Terhadap Sumber Pembiayaan.
	Teknologi	Kebutuhan Teknologi, Kemudahan memperoleh teknologi
	Manajemen Usaha	Kemudahan Untuk Mengelola



Gambar 4. Penentuan Nilai Skor Karakteristik Komoditas Dalam Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

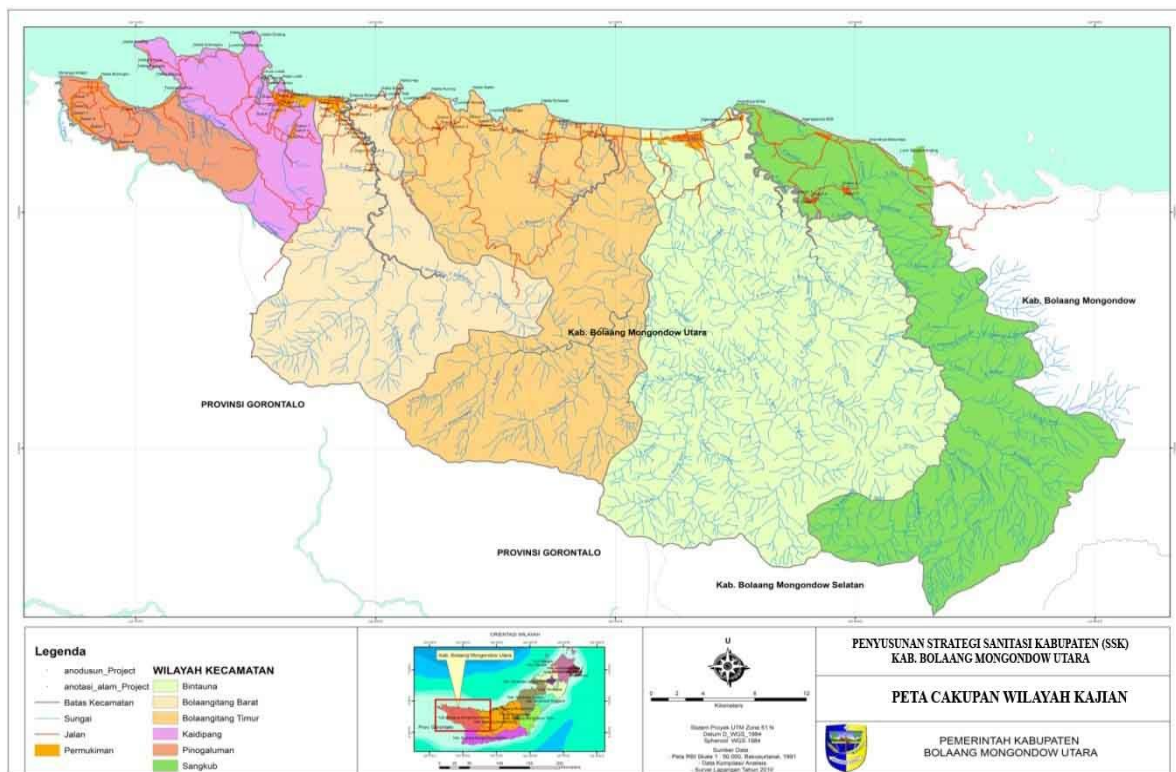
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Utara yang berada di ujung Utara Pulau Sulawesi. Secara geografis terletak antara 0°30' - 1°0' Lintang Utara dan 123°-124° Bujur Timur. Luas wilayah 185.686 ha (1.856,86 km²) ± 12.3% dari luas Sulawesi Utara dengan panjang pantai mencapai 174 km. Secara administratif dibagi menjadi 107 Desa/Kelurahan dan 6 Kecamatan, dengan batas-batas administrasi:

- Sebelah Utara dengan Laut Sulawesi;
- Sebelah Timur dengan, Kabupaten Bolaang Mongondow
- Sebelah Selatan dengan Propinsi Gorontalo;
- Sebelah Barat dengan Propinsi Gorontalo.



Gambar 5. Peta Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

4.1.2 Luas Wilayah Kecamatan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2014, diperoleh informasi bahwa Kecamatan Sangkub merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling luas, yaitu 567,9 km² atau sekitar 30,6% dari total luas Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Sementara

itu, Kecamatan Kaidipang dengan ibukota kecamatan Boroko merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 85,1 km² atau sekitar 4,6% dari total luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Data dan informasi mengenai luas wilayah kecamatan ini akan sangat berguna bagi perencanaan pembangunan wilayah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama yang menyangkut strategi pembangunan dalam rangka untuk optimalisasi potensi penggunaan lahan pada tiap kecamatan. Pilihan program intensifikasi atau ekstensifikasi dalam pengelolaan sumberdaya untuk pengembangan ekonomi wilayah dan masyarakat sangat ditentukan oleh ketersediaan lahan pada tiap kecamatan.

Tabel 3. Kecamatan dan Luas Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	KECAMATAN	IBUKOTA	LUAS WILAYAH	
			(km ²)	(%)
1	Kaidipang	Boroko	85,1	4,6
2	Pinogaluman	Buko	115,6	6,2
3	Bolang Itang Barat	Bolangitang	293,8	15,8
4	Bintauna	Pimpi	348,9	18,8
5	Bolang Itang Timur	Bohabak I	445,6	24,0
6	Sangkub	Sangkub I	567,9	30,6
J U M L A H			1.856,9	100,0

4.2 Tinjauan Kinerja Ekonomi

4.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu umumnya diukur melalui laju konstan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB sebagai salah satu indikator

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

merupakan statistika perekonomian yang paling diperhatikan karena dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik mengenai kesejahteraan masyarakat.

yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah pada suatu periode tertentu, merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah.

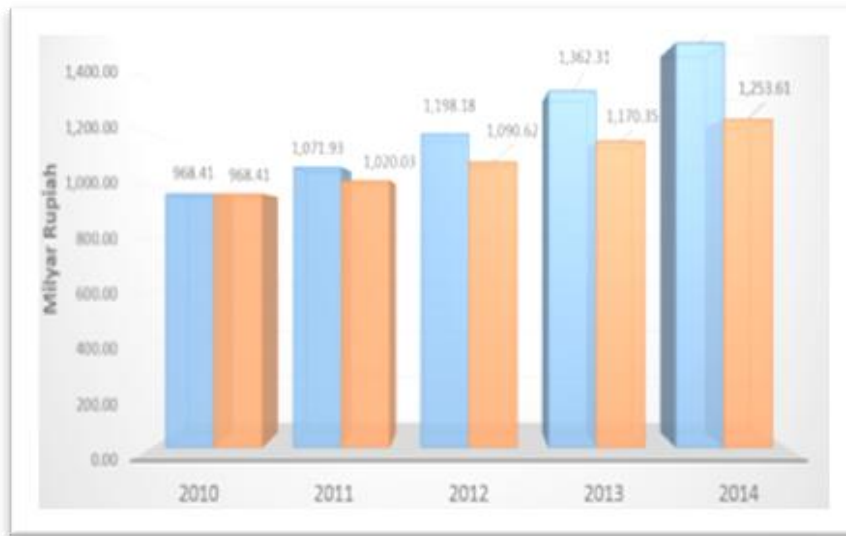
PDRB pada tingkat regional Provinsi menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Dengan kata lain PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah pada waktu tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.

Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh lapangan usahayang mencakup kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalan; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. Nilai PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di kabupaten ini. Pada tahun 2010 nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku sama dengan harga konstannya yaitu sebesar 968,41 milyar rupiah. Berdasarkan harga berlaku nilai PDRB tersebut meningkat menjadi 1.546,30 milyar rupiah pada tahun 2014.

Sementara itu, PDRB atas dasar harga konstan tahun 2010 yang secara umum menggambarkan dinamika produksi seluruh aktifitas perekonomian di Bolaang Mongondow Utara, pada tahun 2014 diperkirakan bernilai 1.253,61 milyar rupiah. Nilai tersebut lebih tinggi 7,11 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1.170,35 milyar rupiah.

Perbedaan pada nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan adalah pada faktor harga. PDRB atas dasar harga konstan dinilai menggunakan harga tahun dasar 2010. Semakin besar inflasi/perubahan harga mengakibatkan semakin besar selisih dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK). Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari tahun 2010-2014 terlihat pada grafik berikut.



Gambar 6. PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2010-2014 (Milyar Rupiah)

4.2.2 Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Kontribusi lapangan usaha memberikan informasi tentang komposisi per kategori yang memberi andil pada perekonomian daerah secara keseluruhan. Kontribusi suatu lapangan usaha dapat meningkat secara nominal, namun menurun secara persentase.

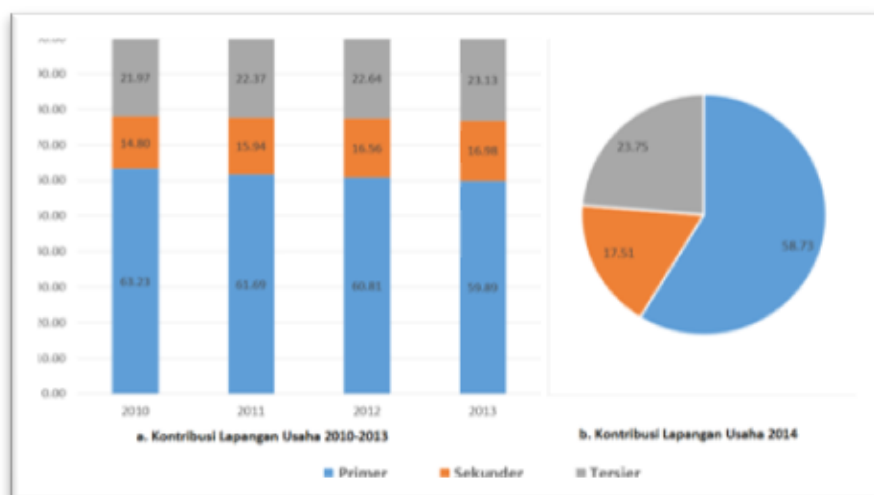
Oleh sebab itu, untuk keperluan analisis, angka persentase distribusi lapangan usaha menjadi lebih penting. Semakin besar persentase distribusi suatu lapangan usaha dalam pembentukan PDRB, maka akan semakin besar pula pengaruh lapangan usaha tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah. Di samping itu, distribusi persentase dapat memperlihatkan kontribusi nilai tambah setiap lapangan usaha dalam pembentukan PDRB sehingga akan tampak kategori-kategori lapangan usaha yang menjadi pemicu pertumbuhan (andalan) di wilayah yang bersangkutan. Lebih jauh lagi, distribusi persentase juga bisa memperlihatkan ada tidaknya pergeseran struktur perekonomian daerah.

Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2011 peranannya terus menunjukkan penurunan, meskipun kategori pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi kategori dengan peranan terbesar. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh peningkatan nilai tambah di kategori lainnya seperti kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, kategori jasa pendidikan dan kategori transportasi dan pergudangan yang selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung menunjukkan tren yang semakin meningkat.

Dalam rangka melihat dominasi dan melihat ada tidaknya transformasi struktur ekonomi, tujuh belas kategori lapangan usaha ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

1. **Lapangan Usaha Primer.** Lapangan usaha yang tidak mengolah bahan baku, melainkan hanya mendayagunakan sumber-sumber alam seperti tanah dan segala yang terkandung di dalamnya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan serta kategori pertambangan dan penggalian.
2. **Lapangan Usaha Sekunder.** Lapangan usaha yang mengolah bahan baku baik dari lapangan usaha primer maupun lapangan usaha sekunder itu sendiri, menjadi barang lain yang lebih tinggi nilainya. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori industri pengolahan; kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; serta kategori konstruksi.
3. **Lapangan Usaha Tersier.** Lapangan usaha yang produksinya bukan dalam bentuk fisik, melainkan dalam bentuk jasa. Dalam klasifikasi PDRB yang terbaru lapangan usah tersier terbagi menjadi 11 lapangan usaha. Kategori lapangan usaha ini meliputi kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; kategori transportasi dan pergudangan, kategori penyediaan akomodasi dan makan minum; kategori informasi dan komunikasi; kategori jasa keuangan dan asuransi; kategori real estat; kategori jasa perusahaan; kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; kategori jasa pendidikan; kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta kategori jasa lainnya.

Gambar 6 berikut ini menyajikan kontribusi berdasarkan 3 lapangan usaha utama primer, sekunder dan tersier. Dari gambar tersebut terlihat bahwa lapangan usaha tersier paling mendominasi dalam penciptaan nilai tambah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama periode 2010-2014.



Gambar 7. Struktur Perekonomian Bolaang Mongondow Utara Menurut Lapangan Usaha Primer, Sekunder dan Tersier Tahun 2010 – 2014

Lapangan usaha Primer mendominasi sekitar 50 persen atau lebih dari separuh total nilai tambah ekonomi Bolaang Mongondow Utara. Dominasi tersebut semakin menurun dalam lima tahun terakhir. Sebaliknya, lapangan usaha sekunder dan lapangan usaha tersier mengalami peningkatan kontribusi khususnya selama periode 2010-2014. Lapangan usaha ini mengalami penurunan *share* dari 63,23 persen ditahun 2010 menurun hingga 58,73 persen di tahun 2014. Berbeda dengan yang terjadi pada lapangan usaha sekunder dan tersier yang masing-masing mengalami kenaikan kontribusi dari 14,80 persen dan 21,97 persen di tahun 2010 menjadi 17,51 persen dan 23,75 persen di tahun 2014.

4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor dominan. Hal ini dilakukan dengan asumsi “proses perembesan ke bawah (*trickle down effect*)” akan terjadi, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan sendirinya akan tercapai.



Gambar 8. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2011 – 2014.

Kemajuan ekonomi secara makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.

Perhitungan pertumbuhan ekonomi mengalami perubahan tahun dasar, yang sebelumnya dihitung menggunakan tahun dasar 2000 dan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) 1990

sekarang sudah menggunakan tahun dasar 2010 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) 2009. Dengan menggunakan tahun dasar baru 2010 pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Utara berada pada kisaran tujuh persen.

4.2.4 Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha

Seluruh lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif di tahun 2014. Adapun lima kategori lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi diantaranya kategori konstruksi mencatat sebesar 12,92 persen, kategori real estat sebesar 10,84 persen, kategori pengadaan listrik dan gas sebesar 10,44 persen, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 10,23 persen, dan kategori pertambangan dan penggalian sebesar 9,57 persen.

Besarnya sumbangan masing-masing kategori lapangan usaha dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2014 menarik pula dicermati. Lapangan usaha yang nilai nominal PDRBatas dasar harga konstannya besar tetap akan menjadi penyumbang terbesar bagi laju pertumbuhan ekonomi, walaupun laju pertumbuhan lapangan usaha tersebut bukan yang terbesar. Kategori pertanian, kehutanan dan perikanan misalnya, walaupun bukan merupakan kategori yang mengalami pertumbuhan terbesar yaitu sebesar 4,17 persen, namun mampu memberikan kontribusi laju pertumbuhan terbesar yaitu 3,38 persen terhadap total pertumbuhan. Kategori konstruksi yang laju pertumbuhannya tertinggi yaitu sebesar 12,92 persen, mampu memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,00 persen. Penyumbang terbesar terhadap laju pertumbuhan ekonomi Bolaang Mongondow Utara tahun 2014 setelah kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori konstruksi adalah kategori pertambangan dan penggalian sebesar 0,79 persen, kemudian diikuti oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda sebesar 0,75 persen dan kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 0,23 persen.

Tabel 4. Kontribusi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, dan Sumber Pertumbuhan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2014

Lapangan Usaha	Kontribusi	Laju Pertumbuhan	Sumber Pertumbuhan Ekonomi
Jasa Perusahaan	0,01	7,23	-
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	10,44	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,27	6,83	0,02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	7,77	0,02
Informasi dan Komunikasi	0,55	7,08	0,04
Jasa lainnya	0,72	9,73	0,05
Jasa Keuangan dan Asuransi	0,84	3,37	0,06
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,99	7,41	0,07

Transportasi dan Pergudangan	1,28	7,09	0,09
Jasa Pendidikan	2,39	7,02	0,17
Real Estat	2,88	10,84	0,20
Industri Pengolahan	3,14	7,01	0,22
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,27	8,69	0,23
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	10,55	10,23	0,75
Pertambangan dan Penggalian	11,13	9,57	0,79
Konstruksi	14,04	12,92	1,00
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	47,60	4,17	3,38
Produk Domestik Regional Bruto	100,00	7,11	7,11

4.3 Analisis Sektor Basis

Metode *Location Quotient (LQ)* digunakan untuk membandingkan nilai PDRB lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah tertentu dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama di wilayah atasnya. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar⁸. Tahun Dasar adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.

Asumsi yang digunakan adalah produktivitas rata-rata/konsumsi rata-rata antar wilayah yang sama. Alat analisis *Location Quotient (LQ)* ini digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif kegiatan ekonomi di Bolaang Mongondow Utara dengan membandingkannya terhadap Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan analisis LQ itu terdapat petunjuk adanya keunggulan komparatif dari sektor-sektor ekonomi yang telah lama berkembang di Bolaang Mongondow Utara, sedangkan bagi sektor baru atau sedang tumbuh apalagi selama ini belum pernah ada, maka LQ tidak dapat digunakan karena produk totalnya belum menggambarkan kapasitas riil daerah tersebut. Selain itu, terdapat juga gambaran atau petunjuk adanya komoditas dai dalam sektor tersebut yang berpotensi untuk diekspor atau tidak.

Berdasarkan analisis LQ maka di Bolaang Mongondow Utara terdapat tiga sektor ekonomi yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu sektor jasa ($LQ=1,89$) dan pertanian ($LQ=1,88$) serta sektor pertambangan dan penggalian ($LQ=1,68$) karena ketiga sektor tersebut mempunyai nilai LQ lebih besar dari 1 ($LQ > 1$). Ketiga sektor yang mempunyai nilai $LQ > 1$ tersebut biasanya dinamakan juga Sektor Basis, yaitu sektor yang mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah lebih besar dari sektor lainnya melalui peningkatan kiberja ekspor dari wilayah tersebut sehingga

dengan menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku, sehingga akan menghasilkan penambahan kekayaan daerah dan menciptakan peluang kerja.

Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut mampu menghasilkan komoditi atau jasa untuk memenuhi permintaan dalam daerahnya dan juga dapat mengekspor ke luar daerah. Kondisi ini akan mendorong terjadinya arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja baru. Penentuan sektor unggulan ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memprioritaskan pembangunan sehingga pembangunan daerah akan lebih fokus dan dapat lebih terencana dengan baik.

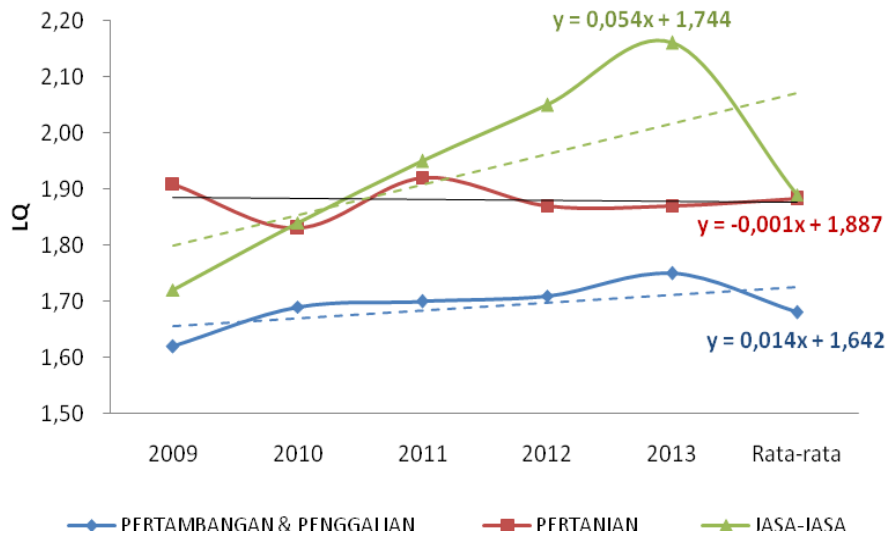
Tabel 5. Hasil perhitungan LQ Sektor Perekonomian Kabupaten Bolmut (Data Hasil Olahan BPS, 2013; Sambuari dkk, 2015)

LAPANGAN USAHA	2009	2010	2011	2012	2013	Rata-rata
PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	0,21	0,20	0,20	0,20	0,19	0,20
LISTRIK, GAS & AIR BERSIH	0,34	0,33	0,33	0,32	0,30	0,33
INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS	0,39	0,36	0,36	0,36	0,37	0,37
KEUANGAN, REAL ESTATE, DAN JASA PERUSAHAAN	0,46	0,45	0,43	0,42	0,39	0,44
PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	0,52	0,52	0,45	0,44	0,42	0,48
KONSTRUKSI	0,70	0,70	0,75	0,77	0,82	0,73
PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	1,62	1,69	1,70	1,71	1,75	1,68
PERTANIAN	1,91	1,83	1,92	1,87	1,87	1,88
JASA-JASA	1,72	1,84	1,95	2,05	2,16	1,89

Namun demikian, ternyata ketiga sektor yang termasuk Sektor Basis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini tidak menunjukkan kecenderungan kinerja yang sama pada periode 2009 – 2013 (Gambar 8). Sektor Jasa dan Sektor Pertambangan dan Penggalian walaupun kecil, tetapi menunjukkan kecenderungan meningkat yang ditandai dengan trend linear yang dibentuk oleh kedua sektor tersebut, yaitu $Y = 0,054x + 1,744$ (Jasa) dan $Y = 0,014x + 1,642$ (Pertambangan dan Penggalian). Sedangkan Sektor Pertanian pada periode yang sama menunjukkan trend linear yang menurun, yaitu dengan regresi $Y = -0,001x + 1,887$.

Kondisi ini diduga disebabkan oleh semakin meningkatnya kegiatan sektor jasa, terutama jasa yang dikelola oleh pemerintah daerah, dan juga terdapat kecenderungan kecil adanya peningkatan kegiatan penambangan dan penggalian pada areal tertentu untuk kebutuhan bahan material

pembangunan sarana dan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara seperti penggalian dan pengambilan batubatuan, pasir dan tanah, batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, pasir untuk bahan bangunan. Kondisi yang agak sedikit berbeda terjadi pada sektor pertanian, yang menunjukkan terjadinya pelambatan kegiatan, sehingga cenderung terjadinya penurunan peran secara komparatif bila dibandingkan dengan kinerja sektor pertanian Provinsi Sulawesi Utara.



Gambar 9. Trend kinerja Sektor Basis (Analisis Regresi Linear Data BPS, 2014)

4.4 Hasil Survey dan FGD

Berdasarkan hasil survey dan juga FGD, terdapat beberapa hasil yang diperoleh dari **Kegiatan Diskusi Fokus**, diantaranya:

1. Tersampaikan dan tersosialisasikannya **Kegiatan Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal di Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara** yang saat ini sedang berjalan.
2. Pelaksanaan diskusi dilakukan dengan membagi peserta dalam kelompok-kelompok sesuai komoditas dan usaha yang dijalankan, kemudian, secara partisipatif diminta untuk memberikan penilaian karakteristik dan kinerja dari pengembangan komoditas dan usahanya tersebut.
3. Tahap Pertama diskusi fokus diarahkan kepada penentuan kluster komoditas dan usaha yang telah dikembangkan, yaitu sesuai dengan lokasi geografis pengembangannya.
4. Tahap Kedua, seluruh peserta sesuai dengan pengelompokannya diminta untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dan karakteristik komoditas dan usaha yang dijalankannya dengan memberikan penilaian langsung terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan komoditas dan usahanya tersebut, yaitu:

- a) **Faktor Pengungkit** yang terdiri dari variabel Jumlah Unit Usaha, Pasar, Ketersediaan Bahan Baku, Kontribusi Terhadap Ekonomi Lokal, Sarana Produksi/Usaha, Sosial Budaya (Faktor Endogen), dan Penyerapan Tenaga Kerja.
 - b) **Faktor Penghambat** yang terdiri dari variabel kebutuhan terhadap Tenaga Kerja Terampil, Modal, dan penerapan Teknologi, serta tingkat Manajemen Usaha.
5. Berdasarkan hasil penilaian peserta terhadap faktor pengungkit dan penghambat (data masih dalam tahap revisi) pengembangan komoditas dan usaha yang dijalankan, maka untuk sementara, telah teridentifikasi berbagai komoditas dan usaha yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai penggerak ekonomi lokal, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:
- a) Kelompok Komoditas/Usaha yang kegiatannya telah berjalan lama karena didukung oleh kondisi sumberdaya alam dan geografis yang memadai. Komoditas/usaha yang termasuk kelompok ini adalah Jagung, Sagu, Cabe, dan Padi Sawah.
 - b) Kelompok Komoditas/Usaha yang kegiatannya telah berjalan lama karena didukung oleh kondisi sumberdaya alam dan geografis yang memadai, namun pengembangannya masih sangat perlu bantuan dan intervensi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Komoditas/usaha yang termasuk kelompok ini adalah Budidaya Ikan Kerapu, Kakao, Peternakan Ayam, Penangkapan Ikan Deho, dan Peternakan Sapi.
 - c) Kelompok Komoditas/Usaha yang kegiatannya telah berjalan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, dan masih sangat perlu bimbingan dan arahan dalam pengembangannya. Komoditas/usaha yang termasuk kelompok ini adalah Budidaya Kacang Hijau dan Usaha Pembuatan Kopi dan Kopra serta Industri Pembuatan Tahu.

Sesuai dengan salah satu prinsip Pengembangan Ekonomi Lokal, yaitu pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat secara terpadu dan berkesinambungan untuk mendorong keberhasilan dan keberlanjutan program Pengembangan Ekonomi Lokal di Bolaang Mongondow Utara, maka melalui **Kegiatan Diskusi Fokus** juga telah dibentuk Lembaga Kemitraan PEL yang untuk sementara anggotanya terdiri dari:

Nama	Alamat	Bidang Komoditas/Usaha
SUHARTO LONDA, SP, M.Si	Desa Binjeta	Padi Sawah
SUNARTO VAN GOBEL	Desa Binuanga	Jagung
LEPI NANI	Desa Binjeta	Kakao
ARIFIN BOLOTA, S.Pd	Desa Kuala	Perikanan
YUSMAN HUNOWU, SP	Desa Bigo Selatan	Peternakan

Secara lengkap, hasil-hasil yang diperoleh dari Survey dan FGD ini adalah sebagai berikut:

1. Klaster Komoditas Padi dan Jagung

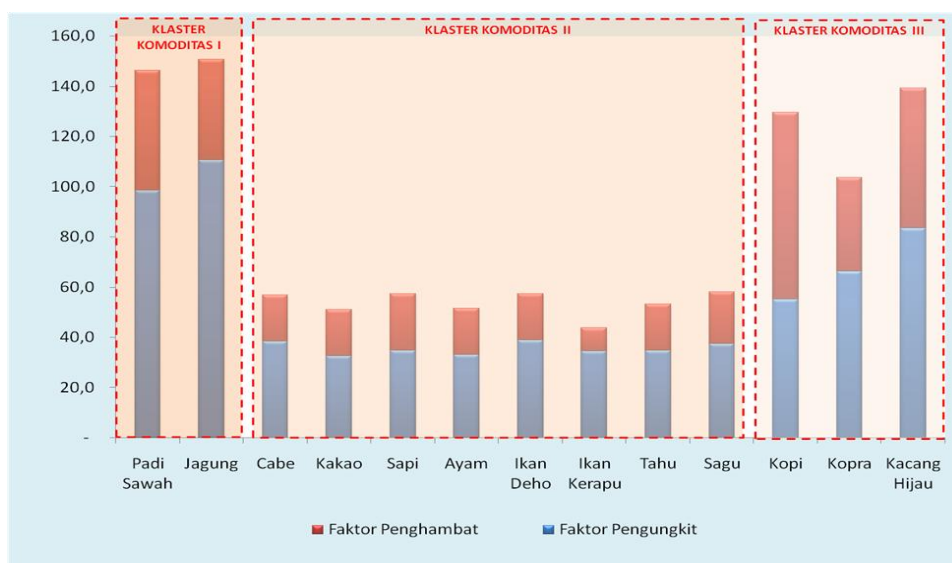
Komoditas ini merupakan komoditas andalan pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang memiliki potensi dan berbagai keunggulan dibandingkan komoditas lainnya. Namun demikian, untuk dikembangkan sebagai komoditas yang dapat mendorong PEL secara berkesinambungan, perludanya peningkatan dalam hal (1) teknologi benih, yang ditujukan untuk meninkan kualitas benih yang lebih tahan dan mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca; (2) manajemen usaha, yang terkait dengan pengelolaan kelembagaan dan keuangan para petani; dan (3) peningkatan tenaga kerja terampil, terutama dalam penanganan pasca panen.

2. Klaster Komoditas Ikan Kerapu dan Ikan Deho

Kelompok komoditas ini merupakan komoditas yang didukung oleh sumberdaya alam yang cukup besar, namun dalam upaya untuk mendorong menjadi komoditas PEL, maka perlu dilakukan (1) intervensi kebijakan nasional, terutama dalam hal modal, teknologi dan pemasaran; (2) penyediaan lahan dan areal yang sesuai dengan pengembangan komoditas, sehingga perlu didukung oleh kebijakan pemetaan komoditas yang terpadu.

3. Klaster Komoditas Kopi dan Kopra

Kelompok komoditas ini merupakan komoditas yang didukung oleh sumberdaya alam yang cukup besar, sudah berjalan dalam kurun waktu yang cukup lama, namun perkembangannya cenderung lambat atau jalan di tempat. Oleh karena itu, dalam upaya untuk mendorong menjadi komoditas PEL, maka perlu dilakukan (1) peningkatan stategi pemasaran yang efektif, terutama untuk komoditas kopra dan kopi; (2) penyediaan lahan dan areal yang sesuai dengan pengembangan komoditas, terutama untuk budidaya kopi, dan (3) peningkatan teknologi pembuatan dan penguatan modal terutama untuk komoditas kopra.



Gambar 10. Penentuan Klaster Komoditas/Usaha PEL Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

4.4.1 Klaster Komoditas Padi dan Jagung

A. Komoditas Padi

Sebagian besar daerah ini memiliki lahan pertanian khususnya padi. Padi merupakan makanan pokok masyarakat yang hasilnya sangat besar dalam memberikan kontribusi bagi pendapatan petani. Padi yang ada di Kabupaten Bolmong Utara bersumber dari padi sawah dan padi ladang. Khusus padi ladang sumber airnya berasal dari tadah hujan tergantung musim, sedangkan untuk padi sawah sumber airnya berasal dari pengairan irigasi yang ada.

Namun demikian ada beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi dari FGD tersebut diantaranya: (1) Irigasi; irigasi menjadi satu-satunya alternatif untuk mengairi sawah. Hampir seluruh kecamatan memiliki irigasi, tetapi terkadang pembagian air yang tidak merata menjadi masalah utama sawah memperoleh sumber air yang pada akhirnya akan mempengaruhi produksi pertanian. (2) cuaca; kekeringan yang selama ini dialami dirasakan oleh sebagian besar petani menjadi faktor penghambat produksi padi. Banyak sawah yang tidak mendapatkan pasokan air sehingga tanaman banyak yang mati. Memang disadari faktor alam sulit untuk dikendalikan oleh manusia. (3) penanaman tidak serentak; kondisi ini disebabkan oleh kurangnya penyuluhan dan keterlambatan bantuan baik pupuk maupun bibit. (4) tingginya biaya produksi; hal ini menyebabkan harga jual padi meningkat. (5) kelangkaan pupuk dan sarana produksi; keberadaan pupuk dan sarana produksi terkait dengan stok yang terbatas serta mekanisme harga yang fluktuatif. (6) hama/ penyakit; masih dirasakan perlu ada penanganan khusus untuk mengantisipasi serangan hama dan penyakit pada tanaman padi. Tidak sedikit padi yang mati diakibatkan oleh merambahnya hama/penyakit yang berimbas pada menurunnya produksi. (7) terbatasnya infrastruktur (jalan akses, bendungan); jalan tani dan bendungan sangat mendukung berhasilnya produksi dan pemasaran hasil pertanian.

Selama ini oleh masyarakat khususnya petani dirasa bahwa keberadaan infrastruktur masih sangat terbatas. (8) kelembagaan; kelembagaan yang mengorganisir petani masih sangat rendah eksistensinya. Keberadaan lembaga pemerintah dalam hal ini BP3K belum optimal dalam menggerakkan sektor pertanian. Selain itu pula bahwa kerjasama antar kelompok tani masih kurang. Kecenderungan kelompok tani bergerak secara sendiri-sendiri.

B. Komoditas Jagung

Komoditas Jagung merupakan salah satu andalan di Kabupaten Bolmong Utara karena dari kultur tanahnya sangat cocok untuk pengembangan komoditas tersebut. Pasarnya pun masih sangat terbuka dengan kondisi harga yang stabil. Beberapa permasalahan dari pengembangan komoditas ini antara lain: (1) terbatasnya modal; khususnya bagi para penampung lokal jagung sehingga para penampung asing menjadi tujuan para petani untuk memasarkan hasil jagungnya. (2) sarana produksi; proses pengolahan lahan dan hasil masih dilakukan secara tradisional belum modern. Disamping itu

keberadaan sarana produksi masih dirasakan kurang oleh petani. (3) kurang dan mahal biaya bibit; terbatasnya ketersediaan bibit dan mahal harga bibit menyebabkan biaya produksi jagung semakin tinggi. Sehingga untuk menunjang daya saing juga akan semakin rendah.

Kedaulatan pangan tidak hanya menekankan pada sumber daya lokal sebagai basis pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menekankan pada peranan masyarakat lokal. Keterlibatan aktif masyarakat lokal diyakini akan menjadikan lingkungan sekitar dan kondisi sosial-budaya serta politik pangan masyarakat lokal lebih berkembang. Konsep kedaulatan pangan mensyaratkan berkembangnya sistem pangan yang cocok dengan kondisi sumber daya yang ada, baik dari sudut lingkungan (termasuk lingkungan alam, lingkungan sosial, dan budaya), teknologi (termasuk budaya, kebiasaan dan praktek-praktek keseharian lainnya), maupun sumber daya manusianya. Dalam hal ini, sistem dan struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi pangan perlu dikembangkan, dibangun dan disesuaikan dengan sumber daya lokal (indigenous). Pemahaman yang memadai terhadap berbagai aspek di atas sangat penting dalam upaya untuk pemberdayaan petani guna memperkuat kedaulatan pangan demi terciptanya ketahanan pangan.

Dalam rangka menentukan strategi dan kebijakan pertanian dan pangan khususnya komoditas padi dan jagung pada masa depan kiranya perlu mempertimbangkan beberapa aspek berikut:

1. Strategi pengembangan pertanian di sektor hulu lebih di orientasikan pada pengembangan yang berbasis pasar dan agribisnis modern sehingga terkait dengan bidang lainnya seperti penyediaan bibit unggul yang memadai, perluasan subsidi pupuk, pelaksanaan dan pemantauan kredit pertanian yang murah, teknik dan manajemen pertanian yang profesional.
2. Mekanisme penunjangkan rekanan impor beras harus dilakukan secara transparan agar tercapai tingkat harga yang rasional di tingkat konsumen tanpa merugikan petani.
3. Kebijakan diversifikasi produk pangan melalui sosialisasi dengan pendekatan ekonomi sehingga dapat mendorong motivasi petani menanam jenis tanaman alternatif selain beras.
4. Pembangunan sektor pertanian harus dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan di daerah perdesaan dalam kerangka pembangunan kesejahteraan masyarakat petani di desa.

4.4.2 Klaster Komoditas Ikan Kerapu dan Deho

Pendekatan konsep pengembangan ekonomi lokal ini memberikan peluang kepada suatu komunitas untuk berperan dan berinisiatif menggerakkan sumberdaya-sumberdaya lokal yang ada untuk membangun komunitas tersebut. Dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini memungkinkan kelompok masyarakat miskin produktif seperti nelayan dapat masuk dalam mata rantai perekonomian yang lebih besar (Dendi et al, 2004).

Sebuah ironi kehidupan masyarakat pesisir, yakni hidup miskin ditengah kekayaan potensi sumberdaya perikanan yang ada disekitarnya. Berbagai pertanyaan kemudian muncul, yang bermuara

pada mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini semata-mata karena *natural resource curse* (kutukan sumberdaya alam), yakni suatu fenomena di mana wilayah dengan sumberdaya alam yang melimpah justru mengalami pertumbuhan ekonomi yang lamban yang pada akhirnya menyebabkan penduduknya hidup dalam kemiskinan? Ataukah karena sebab-sebab lain? (Fauzi, 2005).

Potensi sumberdaya kelautan di Bolaang Mongondow Utara selama ini telah dimanfaatkan dalam berbagai aktivitas perekonomian, di mana salah satunya adalah dalam usaha perikanan tangkap. Perikanan tangkap itu sendiri merupakan aktivitas perekonomian yang unik bila dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi sumberdaya laut dan ikan itu sendiri yang sering dianggap sebagai sumberdaya milik umum (*common property resources*). Sumberdaya ikan ini bersifat *renewable resources* (sumberdaya yang dapat pulih) tetapi bukan berarti tak terbatas sehingga apabila tidak dikelola secara hati-hati, akan memberikan dampak negatif terhadap ketersediaan sumberdaya ikan dan lingkungan.

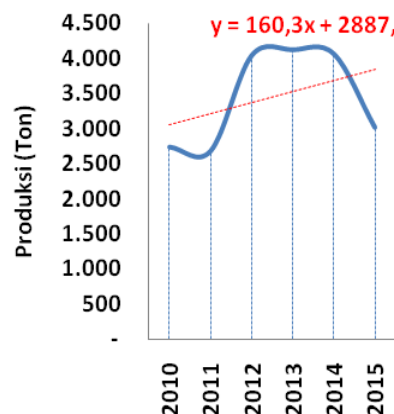
Terdapat dua aspek dominan yang sangat mempengaruhi kegiatan perikanan tangkap khususnya di Bolaang Mongondow Utara ini, yaitu aspek pemasaran dan kondisi sumberdaya laut. Pasar sebagai wakil konsumen merupakan pendorong kuat dimana permintaan akan sejumlah besar ikan datang. Terhadap nelayan, terjadi pertukaran dengan pasar. Nelayan menyalurkan jenis komoditi tertentu serta informasi berkenaan dengan jenis sumberdaya yang dimiliki, sementara pasar menyediakan modal dalam bentuk uang, informasi permintaan dan teknologi melalui pedagang yang berhubungan dengan nelayan.

Kondisi yang terjadi di Bolaang Mongondow Utara saat ini, nelayan memasarkan hasil ikan tangkapannya kepada penampung dan penjual eceran yang menggunakan kendaraan roda dua. Masih terbatasnya optimalisasi aset pemerintah berupa pasar tradisional maupun TPI, menjadikan nelayan sangat tergantung dari para penampung dan pedagang eceran ini. Pembentukan harga ikan seringkali ditentukan oleh penampung dan pedagang eceran, sedangkan nelayan tidak mempunyai posisi yang kuat dalam menentukan harga ikan.

Aspek kondisi sumberdaya alam, dalam hal ini sumberdaya laut sangat ditentukan oleh musim dan kondisi bioekologis perairan. Perubahan cuaca yang tidak menentu sebagai akibat dari adanya Perubahan Global Iklim (*Climate change*) sangat mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan di laut. Perubahan gelombang, tinggi permukaan air laut dan suhu akan mempengaruhi pola migrasi ikan yang menjadi buruan para nelayan. Semakin tidak menentunya perubahan iklim ini, maka akan semakin tidak menentu pula pendapatan ikan tangkapan nelayan. Semakin tingginya intensitas kerusakan biofisik perairan laut juga mempengaruhi jumlah hasil tangkapan. Kerusakan mangrove dan terumbu karang sebagai bagian dari ekosistem pesisir yang menjadi penyangga stabilitas kelimpahan ikan di laut akan sangat mempengaruhi jumlah tangkapan ikan nelayan. *Illegal fishing* dan rendahnya penegakan hukum menjadi pendorong kuat semakin rusaknya ekosistem hayati laut dan pesisir yang mempengaruhi jumlah tangkapan ikan nelayan.

Berdasarkan peta sebaran ikan pelagis yang terdapat di Perairan Utara Sulawesi, terlihat bahwa praktis hanya terdapat satu bulan saja masa puncak produksi ikan, yaitu bulan Januari yang menggambarkan adanya migrasi ikan pelagis pada kawasan utara Sulawesi ini. Sedangkan pada bulan lainnya seperti November hingga Desember yang ditangkap adalah juvenil dan pada Pebruari hingga Juni yang ditangkap adalah ikan yang berukuran 6-9 ekor/kg, serta ditangkapnya ikan cakalang berukuran kecil (baby cakalang/''maesang'') dan tuna berukuran kecil (''babida'') dengan berat 8-10 kg/ekor. Kondisi perikanan tangkap yang masih sangat tergantung pada musim dan pola migrasi ikan ini sangat menyulitkan bagi nelayan, khususnya nelayan tangkap di Bolaang Mongondow Utara untuk dapat bertahan hidup dan mengandalkan kehidupannya dari hasil tangkapan ikan di laut.

Dalam usaha perikanan tangkap, permasalahan yang sering terjadi adalah tingkat penangkapan ikan di suatu wilayah yang melebihi potensi lestarnya (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) sehingga terjadi fenomena tangkap lebih (*overfishing*) yang berakibat pada penurunan hasil tangkapan persatuan upaya (*catch per unit effort*) yang pada gilirannya mengakibatkan penurunan pendapatan nelayan.



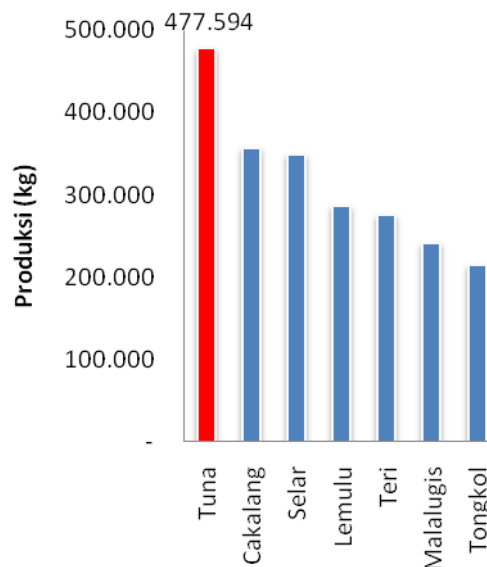
Gambar 11. Grafik Produksi Perikanan Tangkap Bolaang Mongondow Utara Periode 2010 - 2015

Febrianti dan Nasution (2014) menyebutkan bahwa larva yang tertangkap di perairan Laut Sulawesi sebanyak 800 ind/m³ terdiri dari 35 famili yang didominasi oleh Clupeidae (35,88%), Engraulidae (22,75%), Scombridae (8%), dan Labridae (8%). Pendekatan yang bagus untuk pengelolaan, khususnya penutupan daerah dan musim penangkapan, namun diperlukan kajian lanjut. Berdasarkan data produksi perikanan tangkap Bolaang Mongondow Utara, terdapat kecenderungan terjadi peningkatan produksi pada kurun waktu 2010 – 2015, yaitu dengan persamaan regresi $Y = 160,3 X + 2887$ (Gambar 10).

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perikanan tangkap di perairan Bolaang Mongondow Utara cenderung positif dan dapat diandalkan sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat, terutama

masyarakat pesisir. Pada tahun 2015 ini, jumlah nelayan yang bergerak dalam perikanan tangkap di Bolaang Mongondow Utara tercatat 9.010 jiwa, maka pada tahun 2015 ini diperkirakan masing-masing nelayan secara rata-rata mampu memperoleh hasil tangkapannya sebesar 0,34 ton atau sekitar 340 kg. Apabila diasumsikan bahwa harga rata-rata hasil tangkapan nelayan itu adalah Rp. 40.000,- per kilogram, maka dalam satu tahun (2015), nelayan di Bolaang Mongondow Utara mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 13.400.000, atau sekitar Rp. 1.1 juta per bulan. Suatu penghasil yang cukup besar untuk kelompok masyarakat nelayan.

Secara teoritis produksi perikanan di suatu daerah ditentukan oleh stok sumberdaya ikan di daerah tersebut dan besarnya upaya penangkapan yang dikerahkan untuk menghasilkan tangkapan. Produktivitas sumberdaya ikan akan ditentukan oleh tangkapan per unit upaya (*Catch Per Unit Effort/CPUE*). Semakin besar CPUE berarti produktivitas sumberdaya ikan meningkat, sebaliknya semakin menurun CPUE berarti produktivitas sumberdaya ikan menurun. Apabila produktivitas sumberdaya ikan menurun maka pengendalian terhadap jumlah upaya penangkapan harus dilakukan. Ketika pemanfaatan (*fishing effort*) lebih besar dari pada tangkapan optimum (MSY), maka akan terjadi pemanfaatan yang berlebihan (*over exploited*).



Gambar 12. Grafik Jenis Ikan Produksi Perikanan Tangkap Bolaang Mongondow Utara

Perhitungan CPUE maupun MSY perairan laut Bolaang Mongondow Utara belum dapat dilakukan secara sempurna, karena masih terbatasnya data dan informasi yang berhasil dikumpulkan. Idealnya, akan diperoleh hasil perhitungan CPUE minimal pada salah satu jenis ikan yang dominan ditangkap di perairan Bolaang Mongondow Utara seperti ikan tuna ataupun ikan cakalang. Setelah itu, apabila memungkinkan akan dihitung potensi lestari perairan laut Bolaang Mongondow Utara dengan pendekatan perhitungan MSY.

Berdasarkan hasil perhitungan CPUE dan MSY ini nantinya akan diketahui kondisi sumberdaya perikanan di perairan laut Bolaang Mongondow Utara yang dikaitkan dengan tingkat pemanfaatan yang mempengaruhi stok ikan sumberdaya perikanan apakah telah mengalami tangkap lebih (*over fishing*) yang ditandai dengan jumlah hasil tangkapan yang cenderung mengalami penurunan. Satu-satunya informasi yang dapat digunakan untuk pendugaan CPUE di perairan Bolaang Mongondow Utara ini adalah hasil penelitian Lasabuda (2014) yang menghitung CPUE optimal di Teluk Labuan Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow yang menyarankan rejim optimal sebesar 338 trip per tahun. Namun demikian, informasi ini pun masih perlu disempurnakan algoritma pengumpulan data khususnya yang terkait dengan stok tuna.

Berdasarkan informasi umum mengenai pemanfaatan perikanan tangkap di perairan Indonesia umumnya dan perairan Laut Sulawesi, terdapat beberapa isu dan permasalahan terkait dengan pengelolaan perikanan tangkap di perairan Bolaang Mongondow Utara diantaranya:

1. Rendahnya kesadaran sebagian besar masyarakat tentang nilai ekonomis ekosistem yang sangat terkait dengan keberadaan sumberdaya ikan,
2. Pengetahuan dan penguasaan IPTEK masih rendah,
3. Koordinasi antar unsur terkait masih rendah,
4. Pemanfaatan sumberdaya ikan tidak merata, sumberdaya ikan neritik (pelagis kecil) telah banyak dieksploitasi, di lain pihak sumberdaya ikan laut dalam (pelagis besar) belum tereksploitasi dengan optimal,
5. Struktur usaha yang kurang berimbang antara usaha kecil dan menengah yang mengakibatkan tekanan yang tidak seimbang antar sumberdaya ikan,
6. Diduga masih terdapatnya cara-cara penangkapan illegal (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh nelayan setempat dan nelayan dari luar.

Oleh karena itu, kebijakan pengembangan dan pengelolaan Perikanan Tangkap di Bolaang Mongondow Utara harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan perikanan secara umum (Pasal 3, UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan) yaitu : (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil, (2) meningkatkan penerimaan daerah (PAD) dan penerimaan negara (devisa), (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi protein hewani, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) pemanfaatan sumberdaya ikan secara optimal, (9) menjamin kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Selain pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap harus memperhatikan norma-norma internasional yang mengatur etika melakukan perikanan. Salah satu diantaranya yaitu FAO, *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yang mengamanahkan dilakukannya beberapa

hal yang berhubungan dengan perikanan tangkap antara lain : (1) pengguna sumberdaya ikan harus menjaga sumberdaya dan lingkungannya dan wajib menggunakan cara penangkapan yang bertanggung jawab, (2) mencegah terjadinya penangkapan yang berlebihan (*over fishing*), (3) pemanfaatan sumberdaya perikanan harus menerapkan pendekatan kehati-hatian (*precautionary measures*), (4) pengembangan dan penerapan alat penangkap ikan harus diarahkan pada alat penangkap selektif dan ramah lingkungan, (5) perlindungan terhadap habitat yang kritis, (6) menjamin terlaksananya pengawasan dan kepatuhan dalam pengelolaan dan lain-lain.

4.4.3 Klaster Komoditas Kopra dan Kopi

Pola pengembangan sektor pekebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada umumnya merupakan perkebunan rakyat yang dikelola secara tradisional dan belum dikembangkan secara besar-besaran. Saat ini, kegiatan perkebunan rakyat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih banyak mengusahakan komoditi kelapa dan sebagian kecil mengusahakan komoditas tanaman perkebunan lainnya seperti kakao, sagu, cengkeh, kopi dan aren. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sub sektor perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini antara lain:

- Relatif masih rendahnya kemampuan petani dalam mengatur pola tanam komoditas perkebunan sehingga pemanfaatan lahan belum optimal.
- Belum adanya kelembagaan yang melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap petani di kawasan pengembangan, sehingga permasalahan yang terjadi dalam pengembangan komoditas perkebunan tidak dapat terdeteksi dengan cepat.
- Masih rendahnya kemampuan petani untuk memperoleh modal untuk pengembangan usaha penanaman komoditas perkebunan.

Oleh karena itu, agar pengembangan komoditas perkebunan ini dapat terus berkembang baik di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan kebijakan strategis, diantaranya:

- Pembinaan teknis mengenai manajemen penanaman komoditas perkebunan, sehingga hasil yang diperoleh akan lebih optimal.
- Meningkatkan kemampuan penyuluh lapangan yang menjadi ujung tombak dalam membina petani secara teknis di areal perkebunan.
- Mendorong kemampuan petani dan kelembagaan yang menaungi kelompok-kelompok petani dalam hal menyusun dan mengajukan usulan permohonan modal kepada perbankan.

Hasil analisis lokasi (LQ) pada luas panen Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bolmut tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 7. Data pada tabel tersebut menunjukkan, bahwa dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki hasil analisis lokasi yang positif atau besar dari satu (sektor unggulan atau basis) di berbagai komoditi tanaman perkebunan. Persentase dan basis perwilayahan pada tanaman perkebunan tersebut menjelaskan bahwa Tanaman **Kelapa** yang

merupakan sektor basis atau unggulan memiliki nilai lebih dari satu terdapat pada 4 Kecamatan yakni Kecamatan Bolangitan Timur dengan nilai (2,8003), Kecamatan Bintauna (1,4326), Kecamatan Bolangitan Barat (1,1820), dan Kecamatan Pinogaluman (1,1070) .sedangkan Kecamatan lainnya belum merupakan sektor unggulan atau basis. Persentase pada komoditi kelapa di Kabupaten Bolmut sebesar 67 %.

Tabel 6. Hasil Analisis LQ Komoditi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013.(Sumber data : BPS diolah 2015)

No.	Kecamatan	Tanaman Perkebunan						
		Kelapa	Cengkeh	Pala	Kopi	Kakao	Lada	Aren
1	Sangkub	0.3736	0.0000	0.5248	0.2962	0.4623	1.7995	1.3540
2	Bintauna	1.4326	0.0000	1.6350	1.8008	2.1472	0.0000	0.7364
3	Bolangitan Timur	2.8003	0.0000	1.4423	1.8218	0.7162	7.2713	0.0051
4	Bolangitan Barat	1.1820	0.0000	1.1348	0.3818	0.7301	0.0000	0.9113
5	Kaidipang	0.7039	0.0000	0.3008	5.1742	0.2222	0.0000	1.1850
6	Pinogaluman	1.1070	0.0000	1.2628	2.1848	3.5858	0.0000	0.8768
Persentase		67%	0%	67%	67%	33%	33%	33%

Sedangkan kopi yang merupakan salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan karena memiliki peluang pasar yang baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sebagian besar produksi kopi di Indonesia merupakan komoditas perkebunan yang dijual ke pasar dunia. Menurut *International Coffee Organization* (ICO) konsumsi kopi meningkat dari tahun ke tahun sehingga peningkatan produksi kopi di Indonesia memiliki peluang besar untuk mengekspor kopi ke negara-negara pengonsumsi kopi utama dunia seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi dan berperan penting sebagai sumber penghasil devisa negara. Kopi juga merupakan sumber penghasilan bagi tidak kurang dari satu setengah juta jiwa petani kopi di Indonesia dikarenakan cukup banyak masyarakat yang bermata pencaharian sebagai petani kopi (Syakir, 2010).

Tanaman **Kopi** di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki nilai lebih besar dari satu dan merupakan sektor basis atau unggulan terdapat pada Kecamatan Kaidipang dengan nilai (5,1742), Kecamatan Pinogaluman (2,1848), Kecamatan Bolangitan Timur (1,8218), Kecamatan Bintauna (1,8008). Persentase pada komoditi Kopi di Kabupaten Bolmut sebesar 67 %. Selanjutnya, Tanaman **Kakao** yang merupakan sektor basis atau unggulan yang memiliki nilai lebih dari satu hanya terdapat pada 2 Kecamatan yakni Kecamatan Pinogaluman (3,5858), dan Kecamatan Bintauna (2,1472). Persentase pada komoditi kakao di Kabupaten Bolmut sebesar 33 %.

V. KESIMPULAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Komoditas yang berpotensi dapat dikembangkan sebagai PEL di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah (1) PADI DAN JAGUNG; (2) IKAN DEHO DAN KERAPU; DAN (3) KOPRA DAN KOPI.
2. PEL menjadi bagian dalam perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terutama yang terkait dengan proses manajemen pembangunan.
3. Telah dibentuk stakholder PEL di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam mendorong akselerasi PEL.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Agar hasil Kajian Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini bermanfaat dalam mendorong pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, maka tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah:

1. Sosialisasi hasil kajian kepada seluruh stakeholder termasuk SKPD terkait.
2. Memantapkan dan memformalkan stakeholder PEL.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. 2006. *Panduan Nasional Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal*. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____. 2006. *Manual Operasional Penentuan Status dan Faktor Pengungkit PEL*. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____. 2008. *Laporan Kegiatan Lokakarya Revitalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Kendari*. Direktorat Perkotaan dan Pedesaan. Jakarta.
- Boulle, Jacqui (Ed.). 2002. *13 Langkah KPEL untuk Pengembangan Ekonomi Lokal*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – United Nations Development Programme – United Nations Human Settlements Programme. Jakarta.
- _____. 2004. *Praktek Terbaik Penerapan Pendekatan KPEL (Buku I : Daerah Pilot) Kemitraan bagi Pengembangan Ekonomi Lokal*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – United Nations Development Programme – United Nations Human Settlements Programme. Jakarta.
- Falatehan, A. Faroby. 2009. *Teknik Pengambilan Keputusan Menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Sekolah Pascasarjana Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Fauzi, Akhmad. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan Isu, Sintesis dan Gagasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Gumbira, Said dan Intan. A.H. 2001. *Manajemen Agribisnis*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Jocom, Sherly Gladys. 2009. *Analisis Dampak dan Strategi Pengembangan Agropolitan Basis Jagung Terhadap Perekonomian Wilayah Serta Analisis Pendapatan Masyarakat Petani di Provinsi Gorontalo (Studi Kasus Kabupaten Pohuwato)*. Tesis. IPB. Tidak dipublikasikan.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. UI-Press. Jakarta.
- Nasdian, Fredian Tonni. 2009. *Metodologi Kajian Pembangunan Daerah*. Sekolah Pascasarjana Manajemen Pembangunan Daerah. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Mintarti, Nana. 2007. *Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komoditas Kelapa di Kabupaten Pacitan*. Tesis. IPB. Tidak dipublikasikan.
- Saaty, Thomas L. 1993. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin*. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo 9612

Phone: +62-0435-821125

Fax: +62-435-821752

INDONESIA

Laman: <http://www.ung.ac.id>